

FRANZ MAGNIS-SUSENO

DEMOKRASI **dalam** **PERTARUNGAN** **IDEOLOGI**

PENGANTAR

Sesudah suatu perjuangan lebih dari 50 tahun Indonesia Merdeka berhasil menerapkan apa yang sejak semula dirindukan, suatu kenegaraan yang demokratis. Sesudah Suharto turun tahta, para politisi yang mengambil alih kekuasaan daripadanya, berhasil memperbaiki undang-undang dasar yang ditetapkan sebagai undang-undang dasar untuk sementara oleh BPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, melauli empat amendemen yang menjamin demokrasi dan hak-hak asasi manusia.

Dengan demikian di Indonesia pun terwujud apa yang sepuluh tahun sebelumnya diramalkan, atau, kalau mau, dinyatakan terjadi, oleh Francis Fukuyama dalam tulisannya yang termasyur "*The End of History*", suatu perkembangan global ke arah demokrasi. Akan tetapi kenyataan tidak sesederhana itu. Dalam 18 tahun sejak kita masuk dalam milenium ke-tiga, kelihatan dengan jelas bahwa *the end of history* sama sekali belum tercapai. Seperti misalnya dijelaskan dengan sangat meyakinkan oleh Yuval Noah Harari dalam bestseller-nya *Homo Deus, A Brief History of Tomorrow*, demokrasi menghadapi tantangan teramat serius oleh suatu faktor yang oleh Fukuyama sama sekali belum diperhatikan, yaitu *Artificial Intelligence* (AI). Tetapi tanpa Harari pun kita di Indonesia sudah tahu betul bahwa demokrasi, ya demokrasi kita, tetapi juga demokrasi sebagai cita-cita global, mengalami tantangan serius.

Berikut ini saya membahas (I) pertarungan demokrasi di abad ke-20, (II) mengapa demokrasi yang nampak sebagai "akhir sejarah", ternyata segera menghadapi tantangan-tantangan baru yang serius; saya berakhir dengan (III) suatu renungan tentang demokrasi di Indonesia.

I. TIGA IDEOLOGI MODERNITAS

REVOLUSI PRANCIS

Revolusi Prancis (1798-1795) merupakan suatu ledakan yang membongkar tatanan sosial lama dan keyakinan-keyakinan tradisional. Pembongkaran itu sudah dimulai sejak permulaan abad ke-17 oleh suatu gerakan yang disebut **Pencerahan**. Revolusi Prancis menempatkan umat manusia –semula hanya di Prancis, Inggris dan beberapa negara Eropa Barat lain– di perjalanan ke dalam modernitas. Penolakan terhadap negara sewenang-wenang oleh Thomas Hobbes (1588-1679), pandangan tentang hak-hak asasi manusia dan keterikatan kekuasaan politik pada persetujuan rakyat oleh John Locke (1632-1704), gagasan pembagian kekuasaan oleh Montesquieu (1689-1755) serta idea cemerlang dan eksplosif Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) tentang kedaulatan rakyat dalam revolusi Prancis meledakkan untuk selamanya klaim para raja atas kekuasaan karena kehendak Tuhan serta sekaligus, melanjutkan yang sudah dirintis oleh Reformasi Martin Luther (1483-1546) dan Jean Calvin (1509-1564), menghancurkan klaim Gereja Katolik atas suatu kekuasaan duniawi. Revolusi Prancis membutuhkan lebih dari seratus tahun sampai betul-betul mewujudkan realitas politik di Eropa dan Amerika Utara, akan tetapi dalam dimensi intelektual monopoli kekuasaan agama untuk

selamanya patah. Kalau ilmu astronomi dan fisika sudah total menggantikan pandangan tradisional tentang kekuatan-kekuatan yang menata alam raya –dengan puncaknya Isaac Newton (1642-1727),- maka 70 tahun sesudah Revolusi Prancis Charles Darwin (1809-1882) secara menyeluruh menyapu bersih pandangan tradisional tentang bagaimana manusia muncul di bumi ini. Sedangkan Karl Marx (1818-1883) oleh temannya Friedrich Engels (1820-1895) diklaim menemukan hukum perkembangan masyarakat yang total sekuler.

Sekularisasi pengetahuan manusia (Barat) menjadi prasyarat munculnya ideologi-ideologi. Di masa pra-sekularisasi –oleh Charles Taylor disebut zaman "dunia penuh roh" (*enchanted world*)– mitos dan agama memberikan cakrawala pengertian di dalamnya manusia bertindak. Tetapi dalam sekularisasi cakrawala-cakrawala tradisional kehilangan daya mereka. **Pencerahan** berfokus pada rasionalitas, tetapi rasionalitas itu terutama rasionalitas sasaran (Habermas) yang tidak menjawab pertanyaan, untuk apa itu semua. Kekosongan itu diisi oleh ideologi-ideologi. Dengan **ideologi** dimaksud suatu ajaran atau kepercayaan tentang nilai-nilai dasar yang mendasari anggapan tentang apa yang wajib diusahakan. Ideologi bersifat **politis** karena menuntut agar perpolitikan diarahkan menurutnya, jadi yang mendasari apa yang dipandang wajib

diusahakan oleh masyarakat, dan itu berarti, apa yang harus diusahakan dalam politik.

Harari dalam *Homo Deus* menjelaskan bahwa modernitas melahirkan tiga ideologi besar dan mendasar, yaitu liberalisme, sosialisme-komunis dan fasisme. Tiga-tiganya relevan untuk demokrasi.

LIBERALISME

Liberalisme menjunjung tinggi kebebasan. Intinya adalah kesadaran bahwa setiap orang sebagai individu bernilai pada dirinya sendiri, jadi tidak boleh dikorbankan bagi suatu kolektif, bagi sistem kekuasaan baik politis maupun religius. Pembatasan kebebasan harus diberi alasan yang sah. Maka liberalisme membedakan antara moralitas dan sistem hukum. Moralitas menyangkut keyakinan dan kebebasan masing-masing individu, sistem hukum menetapkan pembatasan-pembatasan kebebasan baik individu maupun kelompok dan komunitas demi keperluan hidup bersama secara damai. Unsur-unsur inti liberalisme adalah hak-hak asasi manusia, negara hukum demokratis, artinya, negara yang wewenangnya ditetapkan/dibatasi dalam suatu undang-undang dasar, yang memperlakukan warga-warganya sesuai dengan hukum yang berlaku,

dan hukum yang berlaku ditetapkan oleh para wakil rakyat. Kekuasaan manusia atas manusia hanya sah kalau dibenarkan oleh mereka yang dikuasai.

Dalam **dimensi politik**, liberalisme memperjuangkan negara yang berdasarkan suatu undang-undang dasar serta bersifat demokratis dalam arti bahwa siapa yang memimpin dan arah ke mana masyarakat dipimpin ditentukan oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas, jaminan terhadap kebebasan-kebebasan demokratis, jaminan hak-hak asasi manusia, serta negara yang bertindak berdasarkan hukum (negara hukum). Dalam **dimensi ekonomi** liberalisme menuntut kebebasan dalam berusaha dan mencari pekerjaan yang melahirkan kapitalisme.

Dengan demikian **anak** utama liberalisme adalah **demokrasi** sebagai mana terwujud dalam semakin banyak negara di abad ke-20. Demokrasi mendapat daya tahan karena liberalisme yang mendasarinya diimbangi oleh warisan sosialisme (di bawah), yaitu kesadaran bahwa suatu masyarakat, jadi negara yang mengurusnya, wajib berat menjamin keadilan sosial serta tidak mengizinkan jatuhnya sebagian masyarakat ke dalam kemelaratan. Kebebasan, nilai mutlak setiap manusia individual, tuntutan keadilan sosial dan solidaritas: itulah

keyakinan-keyakinan yang mendasari demokrasi. Demokrasi dapat disebut anak paling berharga liberalisme.

SOSIALISME MARXIS-KOMUNIS

Ideologi kedua adalah sosialisme. Sosialisme lahir dari pengalaman kapitalisme: rasionalitas perekonomian yang hanya mengikuti pasar kandas pada saat menjadi kelihatan bahwa kebebasan ekonomis memecahkan masyarakat ke dalam mereka yang maju dan beruntung dan mereka yang ketinggalan dan tereksplorasi. Pengalaman itu juga melahirkan, misalnya, ajaran sosial Gereja Katolik (sejak ensiklik *Rerum Novarum* Paus Leo XIII 1891) yang menolak baik liberalisme ekstrem maupun sosialisme ekstrem (lih. berikutnya) dan mengajukan kewajiban solidaritas dan keadilan sosial yang, bersama dengan hormat terhadap cita-cita demokratis, menjadi unsur yang menstabilkan demokrasi di Eropa.

Tetapi irasionalitas kapitalisme terutama melahirkan **sosialisme**, suatu ideologi beraneka variasi yang meyakini bahwa hak milik pribadi merupakan sumber segala ketidakadilan dan malapetaka dalam masyarakat. Sosialisme itu mendapat bentuk ilmiahnya dalam Marxisme. Namun sejak permulaan abad ke-20 **Marxisme terpecah**: Satu cabang menjadi sistem

kekuasaan dan ideologi komunisme, yang satunya yang menjadi kesadaran dasar pelbagai partai sosialdemokrat dan sosialis bukan komunis yang menjadi salah satu pendukung demokrasi (yang karena itu selain pada liberalisme, juga berdasarkan keyakinan akan perlunya solidaritas dan keadilan sosial).

Maka ideologi dahsyat modernitas kedua adalah **komunisme**, sebuah **sosialisme radikal**. Komunisme sama sekali menghapus pasar. Ekonomi seluruhnya ditata oleh negara. Nilai inti komunisme adalah **kolektif**, yaitu kelas-kelas mereka yang dalam kapitalisme tereksplorasi, pertama-tama **proletariat**, kedua juga petani miskin dan lain golongan lemah dalam masyarakat.

Yang khas bagi komunisme adalah bahwa kolektif mempunyai prioritas mutlak terhadap individu. Karena itu individu boleh dikorbankan demi kepentingan kolektif. Inti paham hak-hak asasi manusia, yaitu bahwa setiap orang secara individual merupakan nilai pada dirinya sendiri, ditolak. Dan karena sosialisme ekstrem itu hanya dapat dilaksanakan kalau negara "tanpa ampun" (kata kesayangan Lenin) menindas segala penyelewengan dari cita-cita sosialisme komunis, maka komunisme secara hakiki mewujudkan sistem kekuasaan mutlak, di mana partai komunis berkuasa mutlak, menguasai

seluruh wilayah kehidupan masyarakat, seluruh sistem pendidikan, dan di mana segala ketidaktaatan dihukum dengan penjara atau pembunuhan. Masyarakat komunis hanya dapat dicapai dengan pemaksaan total. Diperhitungkan bahwa antara 1917 (Revolusi Oktober di Rusia) dan 1991 (keambrokan Uni Soviet) lebih dari seratus juta orang mata secara tak wajar karena sistem kekuasaan politik, dengan tidak menghitung mereka yang mati dalam pelbagai perang (perang dunia II, Vietnam, dll.).

Dengan demikian ideologi komunis membuktikan diri sebagai ideologi yang amat ampuh, yang di semakin banyak negara meniadakan segenap usaha-usaha demokratis. Di tahun 1975 -sesudah kekalahan Amerika Serikat di Indochina– sepertiga umat manusia berada di bawah rezim berideologi komunis. Komunisme muncul sebagai musuh dan pemusnah demokrasi.

FASISME

Tetapi ada ideologi lebih dahsyat lagi daripada komunisme, yaitu **fasisme**. Fasisme adalah nama yang diberikan oleh Benito Mussolini (1883-1945) kepada gerakannya yang pada tahun 1922 melakukan *marcia di Roma* (gerak jalan ke Roma)

dan 1925 menggantikan pemerintahan demokratis Italia dengan kediktatoran fasis.

Ada beberapa sumber "intelektual" fasisme. Pertama darwinisme, dengan prinsip *survival of the fittest*, yang juga berarti: yang kalah salah dan harus disingkirkan, demi kemajuan evolusi. *Only the strong and ruthless survive*. Darwinisme menjadi dasar *Darwinisms Sosial* (Tokoh di Jerman Ernst Haeckel) yang mengajar bahwa hanya bangsa-bangsa yang kuat akan mempertahankan diri dan bahwa karena itu sejarah terdiri atas perjuangan di antara bangsa, mana yang bisa menang. Sosialdarwinisme membenarkan usaha bangsa-bangsa yang merasa kuat untuk memenangkan diri dengan perang. Salah satu dasar sekian banyak bentuk fasisme, terutama Nasionalisme Jerman, adalah rasisme yang membedakan antara ras-ras yang mulia dan yang rendah dan memperjuangkan hak ras mulia untuk menjamin diri dengan menindas ras-ras yang dicap rendah. Fasisme mendasarkan diri pada juga pada filsafat Nietzsche (1844-1900) tentang "kehendak untuk berkuasa", hak orang berjiwa bangsawan untuk menginjak mereka yang bermoral budak, pengecekan moralitas sosialisme dan kristianitas sebagai sentimen mereka yang kalah. Nietzsche bicara tentang *die blonde Bestie*, manusia binatang buas berambut pirang.

Fasisme menjadi ideologi yang terus meluas sesudah Perang Dunia I sebagai gerakan yang membenci baik demokrasi sebagai "dekadensi" (pembusukan) dari Barat (Amerika) maupun sosialisme dan komunisme sebagai moralitas para *under-dog*. Fasisme mendapat bentuk paling ganas dalam nasional-sosialisme Adolf Hitler (1889-1945). Nasional-sosialisme adalah kombinasi antara nasionalisme ekstrem yang memperjuangkan superioritas bangsa Jerman, dan rasisme. Nasional-sosialisme mau memenangkan bangsa Jerman dengan **menindas** bangsa-bangsa **ras-ras rendah**, terutama bangsa-bangsa **Sla-via**, seperti Polandia dan Russia. Ras yang dianggap sumber segala kebusukan umat manusia adalah **ras Yahudi** yang karena itu harus dimusnahkan. Bangsa Jerman sendiri harus secara *eugenis* (dengan memperbaiki ciri-ciri genetik ras Jerman) terus ditingkatkan. Orang dengan cacat genetis dibunuh.

Yang membedakan ideologi fasisme dari ideologi komunisme adalah bahwa komunisme, meskipun meremehkan nilai manusia individual, namun masih mempunyai cita-cita humanis dalam arti, bekerja bagi kebahagiaan seluruh umat manusia, serta pertama-tama mereka yang tertindas dan korban eksploitasi di masa depan komunis. Fasisme tidak mempunyai cita-cita humanis apa pun. Fasisme tidak mau membahagiakan siapa pun, melainkan mau memenangkan bangsa dan ras

yang dianggap unggul. Mereka yang dianggap rendah atau lemah, termasuk orang difabel, tidak diberi tempat dan seperlunya malah dimusnahkan.

II. AKHIR SEJARAH?

Sejarah tiga ideologi zaman modern: liberalisme, komunisme dan fasisme, tak kurang dari dramatis (juga karena nasib ideologi-ideologi itu terkait dengan perang dunia II, perang paling mengerikan yang pernah dialami umat manusia, serta beberapa perang kemudian). Komunisme berhasil memanapkan diri dalam Uni Soviet, hasil Revolusi Oktober (1917). Akan tetapi tidak berhasil meluas. Komunisme paling takut terhadap demokrasi-demokrasi Barat yang kapitalis. Tetapi yang sebenarnya **mengancam komunisme** adalah **fasisme**. Di negara-negara yang menjadi fasis, komunisme ditindas: di Jerman, Italia, Hongaria, Rumania, Portugal, Spanyol. 1941 tiga juta prajurit Jerman Nazi menyerang Uni Soviet dan hampir saja menunduknya. Tetapi hanya hampir saja. Tentara Jerman terhenti di depan gerbang-gerbang Moskwa. Kemudian tentara Soviet, dibantu oleh Amerika Serikat, lalu oleh serangan Inggris dan Amerika Serikat dari Prancis, berhasil memukul kembali tentara Nazi. Pada tanggal 30 April 1945 Adolf Hitler menembak diri mati di Berlin, hanya 200 meter dari garis terdepan tentara Soviet.

Kemenangan Uni Soviet menjadi ajang peluasan komunisme. Negara-negara Eropa yang dibebaskan dari pendudukan Jerman oleh tentara Soviet, jadi seluruh Eropa Timur, dengan garis pembatas di tengah Jerman, dikuasai oleh komunis. 1949 Mao Zedong berhasil mengalahkan pemerintahan Kuomintang di Tiongkok. Tiongkok, kecuali Taiwan, menjadi komunis. Enam tahun kemudian Prancis dikalahkan di Vietnam. Vietnam bagian Utara menjadi komunis, dan sesudah 20 tahun berperang di Vietnam (yang mulai dengan keterlibatan Amerika Serikat 1964) Amerika Serikat harus menarik diri dari seluruh Indochina (Vietnam, Kamboja dan Laos) menjadi komunis. Beberapa negara lain juga menjadi komunis, seperti Yaman Selatan, Mozambique, Angola dan Kuba. Kelihatan bahwa liberalisme terus kalah terhadap ideologi komunisme.

Tetapi kenyataannya lain. Kekalahan pertama dialami oleh Kuba. Kuba memang mempertahankan diri, tetapi segala usaha untuk membawa revolusi à la Kuba ke negara Amerika Latin lain gagal. Di Afrika pun pengaruh Uni Soviet terus terpukul, begitu pula di dunia Arab yang di tahun 50-an dan 60-an mengandalkan Uni Soviet. Sudah di tahun 60-an hubungan antara Tiongkok komunis dan Uni Soviet memburuk. Persatuan komunisme dunia -di bawah naungan Uni Soviet- pecah. 1979 Deng Xiaoping mengambil alih kepemimpinan di RRT

dan memantapkan perekonomian dengan mengizinkan praktek-praktek kapitalis. RRT berhasil menstabilkan diri dan -kita loncat 40 tahun- sekarang menjadi kekuatan ekonomis kedua di dunia.

Yang paling dramatis adalah ambruknya komunisme Soviet. Pemimpin Uni Soviet, Michail Gorbacov, menyadari perlu adanya perubahan. Ia memberi signal bahwa kalau dalam negara-negara komunis Eropa Timur mau diadakan perubahan, Uni Soviet tidak akan intervensi. Maka di Juni 1989 mendadak para buruh Polandia berhasil menjatuhkan pemerintahan komunis. Sampai akhir tahun itu semua negara komunis di Eropa Timur mengalami revolusi (tak berdarah) yang menjatuhkan kekuasaan partai komunis. Dua tahun kemudian Boris Yeltsin, pemimpin Republik Rusia, republik terbesar di antara 15 republik yang merupakan Uni Soviet, bersama dengan para pemimpin republik lain, menyatakan pembubaran Uni Soviet.

AKHIR SEJARAH?

Kemenangan liberalisme, jadi demokrasi serta kapitalisme sebagai sistem perekonomian, kelihatan mutlak. Fasisme sudah lama mati. Dan komunisme ambruk. Demokrasi dan ekonomi kapitalis dalam wujud negara sosial (bukan kapitalisme murni, melainkan kapitalisme yang menjamin golongan-golongan

ekonomi lemah) kelihatan satu-satunya model kenegaraan yang "logis". Dapat ditambah di sini bahwa juga satu bentuk kekuasaan alternatif yang terutama selama tahun 60-an dan 70-an menjadi bentuk kenegaraan di hampir semua negara Amerika Latin di tahun 80-an diganti dengan pola demokrasi juga. Tak heran kalau Francis Fukuyami bicara tentang "*the end of history*". Yang dimaksudnya adalah bahwa demokrasi berdasarkan perekonomian pasar sosial merupakan sistem sosial-politik yang paling masuk akal karena paling logis dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemaslahatan segenap masyarakat.

Tetapi perkembangan kemudian jauh berbeda. Sekarang, hampir 30 tahun sesudah Fukuyama menulis tulisannya yang termasyur itu, demokrasi memang masih ada dan kuat, tetapi tandatanya di belakangnya bertambah. Mari kita sedikit melihatnya .

NEOKAPITALISME

Kita mulai dengan ekonomi. Ambruknya komunisme Soviet, itu tidak diragukan, disebabkan terutama karena perekonomian komunis tidak berhasil memenuhi kebutuhan ekonomis masyarakatnya. Sudah terbukti bahwa perekonomian tanpa pasar tidak dapat berfungsi. Tak ada negara "sosialis", artinya

yang menggantikan pasar dengan pengaturan negara, yang berhasil. Tak ada satu perkonomian nir-pasar yang bertahan. Sebaliknya bertahannya komunisme, artinya, kekuasaan partai komunis di Tiongkok dan Vietnam -dua negara itu sekarang terus maju- adalah karena mereka mengembalikan pasar dan berhasil mengembangkan suatu perekonomian kapitalis di bawah pengaturan negara yang tetap dalam tangan partai komunis.

Runtuhnya komunisme internasional disambut gembira dan sinis oleh neo-kapitalisme sebagai bukti bahwa perekonomian yang berhasil adalah yang kapitalistik. Jadi perekonomian yang menolak mencampuri pasar. Kemakmuran dan kebebasan dari gejolak-gejolak sosial apa pun di negara-negara demokratis yang semua memakai perekonomian pasar dipandang sebagai bukti bahwa hanya atas dasar kebebasan pasar suatu perekonomian dapat mantap.

Akan tetapi lagu kemenangan neokapitalisme terlalu cepat. Bahwa perekonomian tak bisa berhasil kalau pasar dimatikan memang sudah terbukti. Tetapi apakah itu berarti bahwa hukum pasar sebagai satu-satunya hukum perekonomian nasional dan internasional akan menjalankan fungsinya menjamin kesejahteraan bagi semua -karena kalau hanya sebagi-

an manusia sejahtera, sudah jelas pergolakan sosial tak akan dapat dihindari?

Ada **dua tantangan** raksasa umat manusia yang tidak bisa dipecahkan oleh neokapitalisme. Pertama **ketidaksetaraan**, kedua **penyelamatan lingkungan hidup**.

Ketidaksetaraan. Masa emas kapitalisme pasar sosial seperti direalisasikan di sebagian besar Eropa bukan-komunis adalah empat puluh tahun sejak berakhirnya PD II. Di situ Jerman, Swedia, Prancis maju secara ekonomis, dalam sistem ekonomi pasar yang justru juga melibatkan kelas buruh. Karena itu situasi sosial di negara-negara itu tenang. Buruh yang dapat membeli mobil mercedes tidak akan mendukung revolusi yang mengancam sistem yang memungkinkan dia membeli mercedes itu. Kemiskinan terbuka hampir hilang, semua warga dapat hidup secara wajar. Tetapi sejak akhir tahun 80-an situasi berubah. Perbedaan antara mereka yang terlibat dalam proses kerja masyarakat dan mereka yang tidak terlibat semakin besar. Kelas menengah bawah mulai terancam merosot ke dalam kemiskinan. Di situ termasuk mereka yang selama lebih dari dua tahun tidak menemukan pekerjaan, kaum difabel, mereka yang sudah berhenti bekerja karena tua, para pendatang dan migran, ibu-ibu yang tidak bisa bekerja karena mengurus anak-anak mereka, perempuan single pada umum-

nya. Ada wacana ancaman "masyarakat 30 persen", maksudnya masyarakat di mana sampai 30 persen penduduk di akhir setiap bulan sudah kehabisan uang (yang berasal dari macam-macam bantuan sosial resmi yang memang mereka terima) sehingga tidak bisa makan biasa. Berlibur atau menikmati fasilitas rekreatif masyarakat tak terbuka bagi mereka. Kelihatan bahwa suatu perekonomian yang mengharapkan kesejahteraan umum dari motivasi egonisme bebas gagal menjamin mereka yang tidak lagi terlibat dalam proses produksi.

Hal itu lebih lagi berlaku di negara-negara yang ekonominya masih lemah. Di mana barangkali ada kelas menengah ke atas sebesar 30 persen yang terus maju dan terus lebih kaya, sedangkan 50 persen masyarakat hidup pas-pasan. Secara ekonomis lebih masuk akal berfokus pada yang 30 persen itu daripada pada yang 50 persen karena yang 30 persen itulah yang berbelanja di mall, memakai fasilitas-fasilitas hebat yang tersedia, berjalan-jalan dengan pesawat terbang.

Jadi neokapitalisme, ya kapitalisme, tidak mempunyai strategi yang bisa mencegah bahwa sebagian masyarakat pelan-pelan merosot ke dalam kemelaratan. Lalu bisa terjadi sesuatu seperti yang terjadi sejak bulan Nopember 2018 di Prancis. Secara tak terantisipasi -bayangkan: sama sekali tanpa ada yang menyangkannya, apalagi memperingatkannya- pecah re-

volusi jacket kuning (yang waktu teks ini ditulis masih terus bergerak). Orang kecil, dengan segera memakai jacket kuning sebagai tanda solidaritas, bangkit, protes, segera rusuh, menyerang polisi, membakar mobil dan toko, dan sudah ada yang mati. Suatu revolusi dalam tradisi Prancis yang memang mengenal sekian revolusi, semuanya dengan kekerasan. Apa yang terjadi? Alasan akhir revolusi tak tersangka itu adalah rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron, sang bintang di antara para pemimpin Eropa, untuk **menaikkan harga bensin**, dengan maksud mengurangi penggunaan mobil pribadi. Rencana ini membuat ember ketidakpuasan 30 persen lapisan bawah masyarakat meluap. Mereka tidak mau menerima lagi. Mereka bilang "cukup" dan "ganti". Baru di saat itu publik umum mulai menyadari bahwa di Prancis -dan di banyak negara lain- ada 30 persen masyarakat **yang sudah lama tidak puas**, yang merasa tidak terlibat dalam kemajuan negara mereka, yang menuduh bahwa pembangunan nasional semata-mata untuk "mereka di Paris", "mereka orang-orang atas". Republik Presiden Macron ternyata bukan republik mereka. Itu tentu sesuatu yang amat serius. Ternyata pembangunan kapitalis sosial tidak cukup social sehingga 30 persen orang - yang sampai sekarang belum bersedia berunding -tidak terlibat dan ketinggalan, dengan sentimen yang semakin penuh rasa dendam dan benci. Suatu sistem ekonomi yang tidak bisa

menangani masalah itu- 'akan menembak mati limabelas juta Prancis itu tidak mungkin? - harus dikatakan gagal.

Tentu yang terkena adalah demokrasi. 30 persen **pemberontak** itu secara demokratis selalu dikalahkan (dalam kenyataan, sistem partai-partai yang menunjang demokrasi di Prancis tidak menampung yang 30 persen itu), jadi demokrasi dalam kenyataan menjadi pembenaran kemajuan sebagian masyarakat (di Prancis 70 persen) di atas 30 persen yang dibiarkan membusuk. Bayangkan kalau misalnya 50 persen masyarakat Indonesia yang pada saat ini kalau bukan miskin (masih hampir 10 persen bangsa Indonesia miskin ekstrem), namun hanya bisa hidup pas-pasan dan setiap hari merupakan perjuangan untuk *survival*, kalau mereka, seperti para baju kuning di Prancis, mengatakan "cukup" - maksudnya: kami tidak menerima lagi- dan "ganti" - tentu **ganti seluruh sistem**, pertama-pertama presiden. Apa yang akan terjadi di Indonesia? Kalau, seperti di Prancis, orang kecil di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Surabaya, Makassar dan puluhan, kalau bukan ratusan kota lain "tidak mau lagi" dan mulai bangkit, rusuh, membakar, betul-betul berevolusi? Impian buruk? Semoga! Tetapi perlu diingat: **revolusi jacket kuning Prancis** terjadi tanpa tanda-tanda sebelumnya. Mendadak ember kekecewaan dan ketidakpuasan mereka luber. Itu tidak membuktikan bah-

wa demokrasi adalah bentuk kenegaraan yang keliru, namun jelas juga bahwa demokrasi sendiri saja belum merupakan solusi masalah-masalah serius yang diderita bahkan oleh orang-orang suatu negara yang semakmur dan -kelihatan– se-nyaman Prancis.

Tetapi ada dimensi ketidak-setaraan lain yang diciptakan oleh kapitalisme, yang perlu diperhatikan. Kapitalisme dengan sendirinya membuat perbedaan yang semakin tajam antara para *winner* dan para *loser* di dunia internasional. Yang menang maju, yang kalah tak terpakai dalam kapitalisme, jadi dalam kenyataan dibiarkan membusuk. Itu dengan sendirinya berarti bahwa negara-negara di dunia akan semakin terbagi antara para *winner* dan para *loser*. Winner: itu barangkali seluruh Eropa, Amerika Utara, jelas-jelas Tiongkok, juga India (yang maju luar biasa, tetapi belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan), Rusia, lalu dua tiga negara di Afrika Sub-Sahara, kebanyakan negara di Amerika Latin dan Asia, Afrika Utara. Indonesia? Semoga. Tetapi sebagian negara akan ditinggalkan oleh kapitalisme karena mereka itu dianggap *hopeless*. Sekian negara di Afrika. Afganistan, bahkan Pakistan yang secara potensial amat mengesankan terancam ditinggalkan. Dunia akan terbagi antara dua pertiga (itu tentu kira-kira) yang tetap dalam jangkauan perekonomian global yang

kapitalistik dan tetap akan maju, dan negara-negara yang akan ditinggalkan, jadi ditinggalkan untuk membusuk. Tetapi tak mungkin yang dua pertiga itu dapat membangun tembok -seperti direncanakan oleh Presiden Donald Trump antara Amerika Serikat dan Meksiko- untuk mencegah satu milyar orang dari negara-negara busuk itu (bisa kita sebut "negara-negara à la Tahiti") mau melarikan diri ke "dunia maju" dalam harapan di sana dapat menemukan pekerjaan dan penghidupan.

Kelihatan sekali bahwa perekonomian yang pada dasarnya kapitalis, yang sekarang "menang" secara global, bisa memecahkan masalah ketidaksetaraan yang merupakan hal kunci bagi perdamaian dan kesejahteraan umum. Kalau kita tidak bisa membangun suatu strategi perekonomian yang menjamin bagi segenap lapisan di segenap wilayah dunia suatu kehidupan yang mencapai kesejahteraan minimal, maka demokrasi tidak akan memecahkan masalah kita. Demokrasi akan memuaskan bagi mayoritas umat manusia, tetapi minoritas yang dibiarkan membusuk tidak akan membiarkan mayoritas itu menikmatinya.

LINGKUNGAN HIDUP: DAPATKAH DISELAMATKAN?

Memproduksi mobil, smartphone atau celana secara ramah lingkungan jelas lebih mahal daripada memproduksikannya tanpa perhatian pada lingkungan. Perhatian pada lingkungan berarti: tak memakai energi yang ikut memanaskan atmosfer bumi, tidak memakai bahan maupun cara produksi yang mengotori, apalagi meracuni udara, air dan tanah, tidak, dalam proses produksi, memusnahkan makin banyak jenis binatang dan tumbuhan, tidak mengancam masa depan pangan bagi manusia, dan banyak hal lain.

Dan karena perhatian pada lingkungan ini menambah biaya segenap produksi, maka suatu sistem perekonomian yang ditata menurut prinsip memaksimalkan keuntungan tidak memperhatikan keutuhan lingkungan. Perhatian pada lingkungan memerlukan tindakan dari negara, pengaturan hukum yang membatasi kebebasan dalam memproduksi.

Tetapi di sini ada kesulitan tambahan dari sudut demokrasi. Demokrasi berarti: apa yang ditata negara, perundangan yang dibuatnya, kebijakan yang diambil, harus disetujui oleh para wakil rakyat. Nah, apakah para wakil rakyat akan bersedia untuk memutuskan sesuatu -misalnya membuat memakai pesawat terbang sedemikian mahal hingga orang tidak lagi

mau berlibur dengan memakai pesawat terbang- yang menuntut pengorbanan, dan pembatasan gaya hidup masyarakat? Sampai sekarang negara-negara yang mengaku perlu diambilnya tindakan radikal untuk menyelamatkan masa depan bumi ini tidak berhasil mengambil tindakan-tindakan radikal itu. Tindakan yang memperhatikan keutuhan lingkungan hidup yang diambil semua negara sampai sekarang masih ringan-ringan dan tidak akan sanggup mencegah malapetaka yang semakin kita ketahui mengancam.

Itulah dasar mengapa filosof **Hans Jonas** berpendapat bahwa demokrasi tidak mampu memecahkan masalah pemeliharaan bumi sebagai ruang kehidupan manusia. Menurut Jonas hal itu mengandaikan suatu "kediktatoran baik-baik" yang dapat memakaskan masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam gaya hidup yang perlu kalau kita mau menyelamatkan masa depan umat manusia.

Apakah memang perlu suatu *benivolent dictatorship* untuk memaksakan tindakan-tindakan yang jelas tidak populer yang dituntut dari umat manusia tentu dapat didiskusikan. Namun yang jelas, pemeliharaan lingkungan hidup merupakan tantangan amat berat dan serius bagi demokrasi. Karena demokrasi berdasarkan liberalisme, dan liberalisme lemah dalam mendasari keharusan-keharusan kolektif yang tidak da-

pat dilarutkan menjadi kepentingan masing-masing individu otonom sebagaimana menjadi hakekat liberalisme. Maka jelas juga, masa depan demokrasi belum terjamin. Apakah rezim-rezim otoriter seperti diwujudkan oleh Wladimir Putin di Rusia, Erdogan di Turki dan Xi Jinping di Tiongkok adalah masa depan umat manusia? Walahualam. Yang jelas, demokrasi bukan akhir sejarah, melainkan suatu tantangan yang sendiri akan menghadapi banyak tantangan.

DITINGGALKAN ZAMAN?

Demokrasi secara etis dan hakiki berdasarkan pengandaian bahwa setiap orang secara individual merupakan nilai maupun pusat kehendak bebas. Maka bagaimana masyarakat dijalankan harus berdasarkan kehendak para warga masyarakat - yang, di antara lain, dipastikan melalui pemilihan-pemilihan demokratis. Tetapi anggapan fundamental itu oleh Yuval Noah Harari dianggap suatu ilusi. Individualitas kita menurut Harari merupakan penipuan diri. Kita sebenarnya suatu konglomerasi algoritme yang semakin dapat diketahui dan semakin akan dimanipulasi. Apa yang kita kehendaki sudah diketahui sebelum kita sendiri sadar dan apa yang mau kita pilih sudah akan dipilih sebelumnya.

Kita akan semakin diketahui. Baik dari pengawasan luar: Di mana pun kita akan berada di bawah sorotan kamera yang mencatat, mendaftar dan mengevaluasi segenap gerak-gerik kita. Dari komunikasi di internet seperti facebook *likes* dan *unlikes* kita akan diketahui lengkap. Melalui pelbagai *gadget* yang akan dipasang pada tubuh kita, diketahui apa yang membuat kita gembira dan sedih, takut dan bersemangat, yang kita setuju dan yang kita tolak. Yang kita anggap keputusan bebas kita tak lain daripada hasil semua data dan algoritme itu. Kita akan total diketahui. Bicara tentang kehendak bebas saya tak akan masuk akal sama sekali karena kehendak saya merupakan hasil evaluasi terus-menerus semua data kita ini sehingga kita akan seratus persen *predictable*.

Ada alasan baik untuk menolak anggapan Harari bahwa kedirian kita yang unik dan otonom ternyata hanya hasil algoritme-algoritme yang mencernakan segala data kita. Tetapi jelas juga bahwa kemungkinan kita dimanipulasi akan bertambah. Bisa saja bahwa kalau misalnya ada dua calon presiden dalam satu pemilu, kita mengira bahwa kita sendiri menentukan siapa yang akan kita pilih, itu pun berdasarkan beberapa pertimbangan, padahal algoritme-algoritme yang mengontrol kita tahu dengan jauh lebih tepat apa yang sebenarnya kita pilih, dan karena itu dapat memanipulasikan kita. Jelas, kita

manusia ini sebenarnya apa, apa kita memiliki individualitas unik tak terganti seperti yang kita anggap biasa (dan yang oleh orang beragama diyakini, sesudah kematian akan masuk ke alam Ilahi secara individual), apa dan sejauh mana kita memiliki kebebasan, sejauh mana kita bertindak berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang kita yakini, atau dalam kenyataan kita menipu diri dan seluruhnya sudah dikendalikan: **suatu tantangan raksasa.**

Dapat diperkirakan bahwa 20 tahun lagi tidak ada lagi taksi dengan manusia sebagai sopir, dan kalau kita perlu taksi, kita beri signal ke internet dan secara otomatis taksi yang paling dekat akan menjemput kita dan membawa kita di jalan yang paling efisien ke tujuan kita. Begitu juga banyak hal yang sekarang kita rasakan bahwa kita yang menentukannya, tidak lagi akan kita tentukan. Di alam ini lalu sikap sebagai kasih, perhatian, belaskasihan apakah masih mempunyai arti atau juga menjadi buah kalkulasi algoritmis harus kita selidiki lagi.

III. DAN DI INDONESIA?

Sikap kaum politisi dan intelektual Indonesia terhadap demokrasi **bersifat dua**. Di tahun 20-an abad lalu kedua sikap itu sudah kelihatan. Semua pejuang kemerdekaan ingin mewujudkan suatu Indonesia yang demokratis. Tetapi Sukarno me-

nolak "demokrasi Barat" dan mau mengembangkan demokrasi Indonesia dari "demokrasi desa", dari musyawarah dan *rembug desa*, yang memang merupakan tradisi asli Indonesia lama. Mohammad Hatta sebaliknya meyakini bahwa dalam dimensi politik, dalam dimensi kenegaraan, demokrasi desa bisa memberi semangat, tetapi tidak bisa memberi petunjuk: di tingkat nasional ya demokrasi seperti dikembangkan di Baratlah yang harus diwujudkan. Undang-undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945 miskin unsur demokratis. Tak ada ketentuan tentang suatu pemilihan umum, kebebasan-kebebasan demokratis "ditetapkan dengan undang-undang" (Pasal 28), jadi justru tidak tegas-tegas dijamin. Namun dengan Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 Nopember 1945 yang mengizinkan pembentukan partai politik Indonesia memulai perjalanan susah ke arah demokrasi. Jalan itu terhenti dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menggantikan "demokrasi liberal" dengan "demokrasi terpimpin". Demokrasi terpimpin berakhir dengan malapetaka nasional tahun 1965 dan 1966, salah satu pembantaian masal terbesar umat manusia di bagian kedua abad ke-20. Sistem kenegaraan Presiden Soeharto bukan demokrasi, meski disebut "demokrasi Pancasila", dia bukan demokrasi dan bukan Pancasila, dan sering disindir sebagai "demokrasi bukan-bukan".

Baru sesudah Orde Baru tumbang, demokrasi dapat diinstall di Indonesia melalui sederetan amendemen UUD 1945 yang memasukkan jaminan demokratis dan hak-hak asasi manusia ke dalamnya. Apa yang terjadi sesudah jatuhnya Presiden Suharto pantas diperhatikan dari beberapa sudut, apalagi kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di Mesir. Pada tahun 2011, mirip dengan yang terjadi di Indonesia 1998, para mahasiswa berhasil menjatuhkan diktator Hosni Mubarrak melalui demonstrasi-demonstrasi demokratis. Dalam pemilihan sesudahnya para *Ihwanul Muslimin* menang dengan 46%, dan tokoh mereka, Mursi, menjadi presiden. Tetapi Mursi mendorong pembuatan sebuah undang-undang dasar yang amat islamistik, yang tidak berhasil diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Mesir. Beberapa bulan kemudian Mursi dijatuhkan dalam suatu *coup d'etat* yang dipimpin Jendral Sisi. Sisi kemudian menyingkirkan *Ihwanul Muslimin*, hampir seribu mereka dijatuhi hukuman mati (diharapkan tidak akan dilaksanakan) dan dipilih sebagai Presiden dengan mayoritas besar oleh mereka yang memang memusuhi *Ihwanul Muslimin*. Revolusi demokratis mahasiswa berakhir dalam kediktatoran militer baru yang sekaligus memecahkan rakyat Mesir ke dalam dua kelompok yang saling memusuhi.

Tetapi di Indonesia tidak demikian. Ada Ibu Megawati. Tetapi para pelaku reformasi semuanya politisi dengan identitas Islam yang kuat: J. B. Habibie sebagai pengganti Suharto sebagai Presiden, Abdurrahman Wahid yang selama 15 tahun memimpin ormas Muslim terbesar di dunia, Amien Rais, mantan ketua Muhammadiyah yang sebagai Ketua MPR terpilih mengantar Indonesia dari suatu sistem otoriter menjadi sebuah demokrasi. Yang paling pantas diperhatikan. Para politisi Muslim itu -termasuk juga Akbar Tanjung, Jimly Assiddique dan lain-lain- tidak memakai kesempatan dalam kekacauan "reformasi" itu untuk membuat Indonesia menjadi negara Islam, melainkan mengantar Indonesia menjadi demokrasi dalam arti sesungguhnya yang tetap berdasarkan Pancasila. Karena itu rakyat Indonesia, beda dengan rakyat Mesir, tidak terpecah, melainkan, sesudah sekian konflik warisan zaman Suharto berhasil ditentramkan, Indonesia menjadi negara yang bersatu, damai, tertata baik, normal. Suatu prestasi yang luar biasa.

Bahwa demokrasi Indonesia mempunyai beberapa kelemahan yang serius -terutama kelemahan partai-partai politik serta merajalelanya korupsi di kelas politik- memerlukan perhatian serius di masa mendatang. Namun ada perlawanan sungguh-sungguh dari dua sudut. Yang satu adalah ekstrem-

isme agamis- seperti misalnya diwujudkan oleh mereka yang menolak NKRI dan mau menggantikannya dengan suatu kalifat, - yang satunya adalah mantan militer tokoh Orde Baru (tentang sikap dalam militer aktif sekarang penulis tidak tahu). Yang terakhir menuduh demokrasi hasil amendemen-amendemen pasca reformasi sebagai terkena virus liberalisme. Mereka menganggap amendemen-amendemen itu tidak sah. Padahal para penatap UUD 1945 justru sadar bahwa UUD itu masih perlu disempurnakan. Tuduhan liberalisme, barangkali tanpa mereka sadari, mencerminkan pandangan Supomo tentang "ide integralis negara Indonesia" di mana rakyat dilihat secara kolektif saja. Tetapi Undang-Undang Dasar teramendemen tentu bukan hanya liberal, karena di dalamnya tetap ada keterarahan pada kesejahteraan semua, sedangkan tanpa kebebasan-kebebasan demokratis suatu demokrasi sejati tak mungkin.

Bagaimana masa depan demokrasi Indonesia akan tergantung dari apakah usaha-usaha radikalisme dan ekstremisme untuk mengakhiri keberagaman Indonesia menjadi makin kuat, atautkah Indonesia terus mengembangkan suatu keagamaan yang bersedia menghormati dan menghargai keberagaman serta hakekat Pancasila sebagai konsensus bahwa Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

PERTANYAAN-PERTANYAAN

1. Manakah ancaman terbesar terhadap demokrasi di Indonesia?
2. Menurut Anda, apakah demokrasi cocok untuk Indonesia, dan kalau cocok, mengapa?

DAFTAR PUSTAKA

- Courtois, S. dll. 1998, *Das Schwarzbuch des Kommunismus. Unterdrückung, Verbrechen und Terror*, München/Zürich: Piper.
- Charles Taylor 2007, *A Secular Age*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Francis Fukuyama 1992, *The End of History and the Last Man*, Glencoe: Free Press
- Franz Magnis-Suseno 1995, *Mencari Sosok Demokrasi. Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- 2000, *12 Tokoh Etika Abad ke-21*, Yogyakarta: Kanisius.
- 2006, *Etika Abad ke-20: 12 Teks Kunci*, diterjemahkan dan diantar oleh Franz Magnis-Suseno SJ, Yogyakarta: Kanisius.
- 2016, *Etika Politik. Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, edisi kedua dengan revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hans Jonas 1984, *The Imperative of Responsibility. In Search of an Ethics for the Technological Age*, Chicago: University of Chicago Press.
- Yuval Noah Harari 2016, *Homo Deus – A Brief History of Tomorrow*, London: Vintage 2017.
- 2018, *21 Lessons for the 21st Century*. New York: Spiegel&Graw.

